

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Firdaus, and Fabian Rizan Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Arifin Hoesein, Zainal, and Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada 2019.
- Bataralifu, Andi. *Penyusunan Permendagri Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sebagai Kebijakan Strategis Menjamin Kesiambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjelang Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2022.
- Candra, Mardi. *Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Dananto, Woro Angga. *Profil Budaya dan Bahasa Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat*. Tangerang Selatan: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, et.al.. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, 2017.
- Eko Atmaja, Muhammad, et.al. *Dinamika Pemilu Jelang Pemilu Serentak 2024*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2023.
- Gede Remaja, I Nyoman. *Hukum Administrasi Negara*. Bali: Universitas Panji Sakti, 2017.
- H.Rifa'i, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Mas'ud, Mukhtar, Bahtiar, and Abd. Rahman. *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng Kota Parepare*. Makassar: Citra Multi Persada, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2013.

- Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010.
- Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nurmalingda Zari. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian dengan Mendeley dan Nvivo)*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka: 2022.
- Nofianti, Leny. *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: UIN Suska Press, 2015.
- Noor, Muhammad. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: INTERPENA, 2021.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Sawir, Muhammad. *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Budi Utama, 2022.
- Tampubolon, Minotaur, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. *Birokrasi & Good Governance*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Jurnal

- Agustin, Salsa, Rizki Maharani, and Rizki Ramadhani. “Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi di Indonesia.” *Governance* 12:2 (2024): 235-252.
- Al Mustaqim, Dede, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. “Peran Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1:1 (2024): 53-66.
- Aminullah Nasution, Sutan Rais, and Amsali Syahputra Sembiring. “Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1:1 (2022): 140-153.
- Annisa Aprilia, Icha. “Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Communication* 13:1 (2022): 70-85.

- Ardiansyah, Raihan, Waluyo, and Rosita Candra Kirana. "Kedudukan dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Pelaksanakan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah." *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* 4:2 (2024): 232-243.
- Armandz Muabezi, Zahermann. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6:3 (2017): 421–446.
- Ashari, et.al.. "Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4:1 (2024): 11635-11644.
- Arbayah, Siti, and Heni Suparti. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 6:1 (2022): 39-48.
- Aunurrahman, Yusron, Galang Asmara, and Rusnan, "The Authority of The Acting Regional Head in The Organization of The 2024 Regioal Head Elections According to Positive Law," *Jurnal Diskresi* 3:2 (2024): 174-181.
- Aska Ali, Arfah, Muhammad Asdar, and Andi Vita Sukmarini. "Media Sosial Instagram sebagai Media Penyampai Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Kota Makassar." *Jurnal Komunikasi* 15:2 (2022): 10-19.
- Bahri, Syaiful, Mohammad Muhibbin, and Suratman. "Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap Dalam Pembangunan." *Jurnal USM Law Review* 7:1 (2024): 180-195.
- Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi, "Legal Position and Authority of Acting Regional Heads." *Pallangga Praja* 6:1 (2024): 1-10.
- Bayu, Ani. "Morfologi Rumah Tinggal Pangeran Arya Denda Kusuma di Desa Mandalangen Kota Cirebon." *Jurnal Arsitektur* 12:1 (2020): 4-8.
- Budianto, Azis. "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 3:1 (2016): 429–444.
- Candrawijayaning Fajri, Pujangga. "Reformulasi Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Upaya Penguatan Sistem Demokrasi." *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara* 3:2 (2024): 190–213.

- Cholifatin, Nur, Siti Murdiana, and Kurniati Zainuddin. "Hubungan Antara Egosentrisme dengan Kecemasan Sosial Pada Mahasiswa Baru." *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 1:6 (2021): 55-62.
- Fathurrohman, Rizaldy Irsyad. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis." *Inskripsi* 2:1 (2022): 1418-1426.
- Firanti, Nuriya, and Sarwenda Biduri. "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat* 1:3 (2024): 1-17.
- Gandra, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2:3 (2020): 92-99.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1:2 (2022): 170–188.
- Handayani, Fitria Andalus, dan Mohaman Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11:1 (2019): 1-11.
- Harimurti, Yudi Wigdado. "Menyoal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1:1 (2023): 1-18.
- Harjudin, Laode, et al. "Menggugat Penunjukkan Pejabat tanpa Pemilihan : Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat." *Journal Publicuho* 5:4 (2024): 1355–1366.
- Hengky Widhi Antoro, Bibianus. "Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum (Catatan Kritis Pemilu Presiden 2024)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2:5 (2024): 1-14.
- Kamaluddin, Santrio. "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang." *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* 3:1 (2019): 222-228.
- Karno, Rano, Waddi Fatimah, and Bellona Mardhatillah Sabillah, "Pola Komunikasi Antara Orang Tua dengan Guru Terhadap Motivasi Belajar

- Siswa Kelas V SD Inpres Manggala Kota Makassar,” *Jurnal Binagogik* 10:2 (2023): 1-7.
- Kasenda, Hizkia, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. “Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 1:2 (2021): 1-9.
- Kelibay, Ismed, et al. “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial* 7:2 (2024): 167–181.
- Ilham Tahir, Muhammad, Asri, and Irsyad Rafi. “Mekanisme Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Imam al-Mawardi (Studi Permendagri No. 4 Tahun 2023).” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3:4 (2024): 713-736.
- Lasa Yahuda, Efron, and Tomy Michael. “Konstitusionalitas Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2:4 (2024): 1036-1045.
- Nathania, Esther, et.al. “The Role of Government in Realizing People’s Welfare: Implementation of Consistent and Planned Good Governance Principles.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5:8 (2024): 1-12.
- Nujum, Syamsu, and Zainuddin Rahman. “ Pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.” *Jurnal Economic Resource* 2:1 (2019): 21-33
- Nurjulaiha, Sinta, Suryanef, and Al Rafni. “Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilu menurut Perspektif *Teory Political Development* (Studi di Provinsi Jambi).” *Indonesian Journal of Social Science Review* 1:2 (2022): 90-99.
- Nurrahman, Muhammad. “Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan.” *Jurnal Retentum* 1:1 (2019): 48–61.
- Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia,” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1:1 (Februari 2023): 40-52.
- Pramudana, Ibnu, and Surya Perdana, “Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Abstrak,” *EduYusitisia* 2:1 (2023): 17–30.

- Ramanda, Dio Ekie. "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6:3 (2022): 10061-10068
- Rachman Hakim, Arief, Yulia Dwi Pratiwi, Syahrir Wahyu Aliansa, and Aisyah Anudya Palupi. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal USM Law Review* 6:1 (2023): 15-33.
- Rifky Setya Anugrah, Akhmad. "Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024: Studi Kasus Kalimantan Barat." *Jurnal Global Futuristik* 1:1 (2023): 54-72
- Rizki Kurnia, Fabian, dan Rizari. "Tinjauan Yuridis Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11:2 (2019): 79-97.
- Rohman, Abd, Yayang Santrian Hanafi, and Willy Tri Hardianto. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Reformasi* 9:2 (2019): 153-160.
- Suhaimi, Ele, and M. Yasin. "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah." *Jurnal Tripantang* 8:1 (2022): 55-65.
- Sumantri, Ii. "Reorientasi reformasi birokrasi dan *good governance* dalam penyelenggaraan sector publik di Indonesia." *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 5:2 (2022): 63-72.
- Sri Anisa, Intan, Mahmuzar, dan Hellen Last Fitriani. "Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Yang Habis Masa Jabatan Sebelum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *ASAS Law Journal* 1:1 (Juni 20223): 38-58.
- Tommy Kusuma, Mochamad, Elva Imedatur Rohmah, Muwahid, and Nafi Mubarak. "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024." *Socio Yustitia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2:2 (2024): 1-32.
- Utama, Dendy Derajat, Didik Suhariyanto, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7203-7218.

Yohana F. Napitulu, Rosana, et.al. "Analisis Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi di Kabupaten Bekasi." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21:5 (Oktober 2021): 106-116.

Skripsi

Any Modana, Candrika Vania. "Analisis Kewenangan Tambahan Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Pemberhentian Dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Bardan Syarif, Abdul Wahab. "Problematisasi Penjabat Kepala Daerah Di Masa Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Khotimah, Siti. "Penerapan Pendidikan Multikultural di Komunitas Pelita Perdamaian Dalam Membentuk Sikap Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Cirebon." *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Pratama, Yoan Dwi. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Sekretaris Daerah Menjadi Penjabat Kepala Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2022)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.

Rahmasari, Lydia Amalia. "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penjabat Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2023.

Wahyudi, Amar. "Kewenangan Penjabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2017 tentang Lambang Daerah.

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Informasi Elektronik

File Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cirebon Tahun 2023.

File Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Cirebon TA 2023.

File Laporan Kinerja Interim Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Triwulan I.

File Laporan Kinerja Interim Pemerintah Daerah Kota Cirebon Triwulan III.

File Laporan Capaian Kinerja Penjabat Wali Kota Cirebon Periode Triwulan IV TA 2024.

File Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor: 700.1.2.1/LHE.119-PEP.

File Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor: 700/LHE.108-PEP.

File Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Pelayanan Publik).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5082/OTDA Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Oleh Menteri Dalam Negeri.

A.M, Hasan. “Menteri Tito Ingatkan Kembali Pj Gubernur, Bupati dan Walikota Terkait Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024.” https://babelprov.go.id/siaran_pers/mendagri-tito-ingatkan-kembali-pj-gubernur-bupati-dan-walikota-terkait-persiapan-pilkada-serentak. (diakses tanggal 26 Agustus 2024).

Aparatur Sipil Negara, Komisi. “Survei KASN: Pj. Kepala Daerah Kurang Optimal Tegakkan Netralitas ASN.” <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/survei-kasn-pj-kepala-daerah-kurang-optimal-tegakkan-netralitas-asn>. (diakses tanggal 26 Agustus 2024).

Ashri, Abdullah Fikri. “Koalisi dengan Nasdem di Pilkada Kota Cirebon, PKS: Mirip Suhu Politik Jakarta,” <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/19/koalisi-dengan-nasdem-di-pilkada-kota-cirebon-pks-mirip-suhu-politik-jakarta>. (diakses tanggal 21 Agustus 2024).

Bandung, Institut Teknologi. “SG KU-4078: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.,” <https://youtu.be/rzKiMdz5AtY?si=47Oq86SOqvKxV7z1> (diakses pada tanggal 30 Januari 2025).

Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten. <https://jdih.bandungbaratkab.go.id/>. (diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

Bappelitbangda. “Implementasi *Good Governance* Pada Pemda.” <https://bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id>. (diakses tanggal 6 November 2024.)

Crisna Matahari, Fanny. “Bawaslu Nyatakan Belum Ada Laporan Pelanggaran di Pilkada Kota Cirebon.” <https://kabarcirebon.pikiran->

rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2938839409/bawaslu-nyatakan-belum-ada-laporan-pelanggaran-di-pilkada-kota-cirebon. (diakses pada tanggal 4 Desember 2024).

Falahul Alam, Jejep. “Polarisasi Politik Pilkada Serentak 2024: Peran Media Sosial dan Ancaman Perpecahan di Masyarakat,” <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/politik/pr-2938792714/polarisasi-politik-pilkada-serentak-2024-peran-media-sosial-dan-ancaman-perpecahan-di-masyarakat>. (diakses pada tanggal 22 November 2024).

Jabar, Humas. “Bey Machmudin Lantik Agus Mulyadi sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon.” <https://jabarprov.go.id/berita/bey-machmudin-lantik-agus-mulyadi-sebagai-penjabat-wali-kota-cirebon-11766> (diakses pada tanggal 22 Juli 2024).

Kependudukan, Dina, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin,” <https://opendata.cirebonkota.go.id/dataset/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin> (diakses tanggal 25 September 2024).

Kota Cirebon, Pemerintah. <https://cirebonkota.go.id/profil/sejarah/>. (diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).

Kota Cirebon, Pemerintah. “Lambang dan Motto Kota Cirebon,” <https://cirebonkota.go.id/profil/lambang/>. (diakses tanggal 22 September 2024).

Kota Cirebon, Pemerintah. “Struktur Organisasi,” <https://cirebonkota.go.id/pemerintahan/struktur-organisasi-2/>. (diakses pada tanggal 25 September 2024).

Kota Cirebon, Pemerintah. “Geografis.” <https://cirebonkota.go.id/tentang-cirebon/geografis/>. (diakses tanggal 22 September 2024).

Kota Cirebon, Pemerintah. “Stabilitas Politik Daerah Terjaga di Masa Pemilu 2024,” <https://cirebonkota.go.id/stabilitas-politik-daerah-terjaga-di-masa-pemilu-2024/>. (diakses pada tanggal 29 November 2024).

Mubarok, Ramadan. “Pemkot Cirebon Catat Rekor Investasi 2024, Tembus Rp. 1,97 Triliun Hingga Oktober.” <https://cirebonkota.go.id/pemkot-cirebon->

[catat-rekor-investasi-2024-tembus-rp-197-triliun-hingga-oktober/](#). (diakses pada tanggal 16 November 2024).

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Wati Sulastri, S.STP. selaku Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Kota Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Eli Haryati, S.Sos., M.Si. selaku Staf Ahli Wali Kota Cirebon Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada tanggal 4 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Giri Yudie Hartanto, S.STP., M.Si. selaku Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Wilayah Kota Cirebon pada tanggal 9 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Mochamad Sesar Dwisepta, S.H., M.Kn. selaku Analis Hukum Bagian Hukum Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 10 Desember 2024.